



► SUAP APARTEMEN

## Haryadi Abaikan Rekomendasi

Sunartono  
[sunartono@harianjogja.com](mailto:sunartono@harianjogja.com)

JOGJA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengabaikan rekomendasi teknis dari DPUPKP terkait dengan izin apartemen Kedhaton di Gedongtengen, Jogja.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan kasus mantan Wali Kota Jogja berkaitan dengan suap pada proses pemberian izin pendirian apartemen pelanggaran hukumnya jelas. Pada aturannya dari sisi lokasi jelas tidak memungkinkan tapi dikeluarkan termasuk juga derajat elevasinya maupun jumlah lantainya dari ketentuan juga dilanggar. Hal ini menunjukkan tersangka telah menerabas sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingannya. Padahal di Jogja berbagai ketentuan baik perda dan aturan lainnya terkait dengan izin hotel dan apartemen sangat limitatif.

“Ketentuan perda yang mengatur tentang perizinan khususnya hotel di Kota Jogja ini sudah sangat limitatif sudah sangat jelas dan pasti, tapi kemudian kepastian dan kejelasan itu justru dilanggar [oleh Haryadi] bahkan rekomendasi teknis dari DPUPKP [Kota Jogja] yang mengatakan tidak memungkinkan itu juga kemudian diabaikan,” katanya se usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (30/6).

### Haryadi Abaikan...

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama *Whistleblowing System* (WSB) antara Pemda DIY dengan KPK. Harapannya dengan kerja sama ini bisa menekan perilaku koruptif oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia berharap ada komitmen pemerintah, ketika regulasi dibuat harus ditegakkan, dan ditaati. Jika peraturan tidak ditaati, kemudian ketidaktaatan itu menunjukkan adanya indikasi korupsi. Dalam kasus yang menjerat Haryadi, lingkungan cagar budaya yang seharusnya tidak boleh dibangun bangunan atau dengan ketentuan yang ketat kemudian ditabrak dengan dibumbui kepentingan pribadi.

"Ini yang kami tekankan ketika berkomitmen apalagi komitmennya diatur dalam Perda itu ada ukuran untuk kemudian ditegakkan. Kalau kemudian ada pelanggaran maka tertentu kemudian pelanggarannya itu menjadi indikator kami untuk turun ada apa ini dan ternyata terbukti ada sesuatu [suap]."

Ghufroon menegaskan KPK berkomitmen untuk mengembangkan kasus suap izin apartemen di Jogja. Menurutnya bisa saja pintu pelanggarannya suap, tetapi ada dugaan suap maupun gratifikasi sebelumnya. Hanya saja, penyidik masih merahasiakan titik mana saja yang dibidik dalam urutan kasus Haryadi.

"Tapi sejauh ini sekali lagi selalu KPK mengembangkannya pada dugaan-dugaan bidang lainnya. Bukan hanya suap saja. Jadi mungkin pintunya suap mungkin kemudian ada suap-suap sebelumnya. Mungkin ada gratifikasi atau ada pemerasan atau bahkan ada melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang lain sedang kami

apa kembangkan," ucapnya.

### Takhta untuk Rakyat

Dalam rapat koordinasi, Ghufroon menjelaskan, Sri Sultan HB IX telah mengingatkan "Takhta untuk Rakyat". Sebuah slogan yang seharusnya diresapi dan dimaknai oleh seluruh pemimpin di DIY saat ini dalam bekerja melayani rakyat. Slogan yang pada akhirnya turut dijadikan pegangan untuk tidak tergiur pada tindakan korupsi karena akan menghambat pembangunan. Tidak hanya itu, para pemimpin juga bisa menjalankan semangat yang telah dipancarkan oleh Tugu Golong Gilig. Tugu yang memiliki filosofi bahwa masyarakat DIY *manunggaling kawulo lan Gusti*. Semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan, sesuatu yang utuh, dan menyiratkan semangat dan niat menyatukan semua golongan. "Warga DIY Anda punya tauladan. Mari kita kembalikan antikorupsi takhta untuk rakyat dengan komitmen melayani rakyat," katanya.

Oleh karenanya, Ghufroon meminta seluruh jajaran Pemda DIY untuk sama-sama menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu maupun kelompok. Dengan semangat itu, Ghufroon meyakini bahwa tidak ada lagi catatan KPK terkait kasus korupsi.

### Pakta Integritas

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan peringatan kepada para pejabat bupati, wali kota, dan aparatur sipil negara (ASN) di DIY agar tidak korupsi.

Sultan menilai sebenarnya sangat mudah untuk menerapkan kebiasaan agar tidak melakukan tindakan korupsi. Kuncinya

semua pejabat atau ASN harus mematuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani melalui pakta integritas. Di dalam perjanjian itu ada sumpah agar tidak melakukan korupsi atau menyalahgunakan kewenangan.

"Kalau saya melihatnya mudah ya [untuk mencegah korupsi], dari kondisi-kondisi antikorupsi itu pelaku-pelaku [korupsi] itu sudah menandatangani kesepakatan [pakta integritas]. Untuk tidak menyalahgunakan [kewenangan] dan korupsi ya dan dia sudah bersumpah juga pada waktu diangkat [jadi pejabat] gitu," ucap Sultan.

Sultan meminta kepada seluruh pejabat di DIY agar jangan mengkhianati perjanjian yang sudah ditandatangani untuk tidak korupsi. Jika dilanggar tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Ia menegaskan tidak bisa membantu ASN jika sudah terjerat hukum. "Jadi itu jangan dikhianati itu aja. Begitu dikhianati ya berhadapan dengan hukum itu konsekuensi dan saya tidak akan melakukan apapun untuk membantunya," ucapnya.

Sultan menegaskan hakikatnya setiap pejabat mengetahui bahwa tindakannya melanggar dan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Gubernur memang memiliki kewajiban membina ASN, tetapi jika sudah melanggar pidana tentu mereka harus menanggung akibatnya secara hukum.

"Dan mereka sudah tahu semua [konsekuensi hukum] untuk itu saya kira itu saja. Saya sebagai Gubernur memang punya tugas untuk membina ASN ya, tapi kalau menyalahgunakan dan melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum ya sudah itu konsekuensi dirinya sendiri *gitu* itu aja," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005